KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Sepakat Kurangi Kunker ke LN
Tanggal : Kamis, 28 Januari 2016
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

DPR Sepakat Kurangi Kunker ke LN

Jakarta, Pelita

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin sepakat untuk mengurangi frekuensi kunjungan (kunker) kerja para anggota DPR ke luar negeri yang bisa menghemat pengeluaran anggaran sebesar Rp139 miliar pertahun.

Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan dalam rapat pimpinan dewan tesebut telah diputuskan kunjungan kerja anggota ke luar negeri menjadi hanya satu sekali dalam setahun.

"Kunjungan kerja anggota dewan hanya diperkenankan satu kali saja untuk pengawasan atau studi banding ke luar negeri," kata Ade di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun dikatakannya juga dikecualikan bagi alat kelengkapan dewan yang terkait dengan parlemen internasional yakni Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Ade sebelumnya mengatakan kalau anggaran kunjungan kerja anggota DPR sekitar Rp360 miliar pertahun sehingga jika frekuensinya dikurangi menjadi setahun sekali dapat dihemat anggaran Rp139 miliar pertahun.

Dikatakannya matrik kunjungan kerja anggota DPR keluar negeri yang hanya sekali setahun, akan disusun tim dari pimpinan DPR yakni Fahri Hamzah, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Roem Kono, serta Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi.

DPR RI memiliki 11 komisi serta tujuh alat kelengkapan Dewan meliputi, Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaranm Badan Urusan Rumah Tangga, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus.

Ade kemarin juga menyebutkan pimpinan DPR sepakat memutuskan mengurangi waktu reses anggota dewan dari lima pekan hanya menjadi tiga pekan, sedangkan frekuensi resesnya tetap lima kali setahun.

Disebutkannya waktu reses anggota dewan akan dikurangi menjadi 17 hari atau tiga pekan dalam setiap reses. Rinciannya lima hari untuk kunjungan bersama Komisi, sembilan hari kunjungan di daerah pemilihan, serta tiga hari kunjungan sosialisasi Undang-undang dan Empat Pilar.

Alasan pengurangan waktu reses, diakui politisi Partai Golkar ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja DPR di bidang legislasi.

"Pengurangan waktu reses selama dua pekan kali lima kali reses, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan target penyelesaian produk UU," katanya,

Dia mengatakan, pengurangan waktu reses dan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri membuat masa kerja anggota DPR setahun berjumlah 180 hari. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan hari kerja parlemen di Amerika Serikat, yaitu 120 hari. "Bu Sekjen DPR telah menjelaskan kepada kami, jumlah waktu kerja DPR RI dibandingkan parlemen AS, yaitu 120 dan Australia 69 hari kerja," ujarnya.

Ade menambahkan rapat paripurna DPR RI baru memutuskan sebanyak 40 rancangan undang-undang (RUU) dalam program legislasi nasional Dengan penambahan waktu pembahasan RUU, Ade yakin target realisasi penyelesaian RUU dapat meningkat signifikan.

"Kami optimistis, target realisasi penyelesaian RUU bisa mencapai 37 RUU dari 40 RUU dalam prolegnas prioritas," katanya.

Meski rapat paripurna DPR sudah mengesahkan 40 RUU masuk dalam prolegnas 2016, namun sebelumnya terdapat catatan dari beberapa fraksi.

"Masukan-masukan (fraksi-fraksi--**Red**) akan menjadi catatan penting, apakah dapat disetujui pengesahan 40 RUU masuk Prolegnas 2016," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon seperti dikutip *Antara*.

Dia mengatakan, masukan-masukan fraksi bisa disampaikan ke Baleg DPR, seperti Fraksi PKB yang menginginkan RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat, RUU Pengembangan Daerah Kepulauan, dan RUU Percepatan Daerah Tertinggal masuk dalam Prolegnas 2016.

Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Subagyo, dalam laporannya di hadapan rapat paripurna mengatakan Baleg telah melakukan koordinasi dengan DPD dan Kementerian Hukum dan HAM dalam membahas Prolegnas 2016. **(did)**